

Nomor : B/137/S.SM.01.00/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Persiapan
Pengadaan ASN Tahun 2024

08 Januari 2024

Yth.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Daerah di lingkungan Instansi Pemerintah (terlampir)

di

Tempat

Berkaitan dengan Perencanaan Kebutuhan ASN Tahun 2024, Menteri PANRB telah menyampaikan surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menindaklanjuti arahan Menteri PANRB serta dalam rangka menyamakan persepsi mengenai kebijakan perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami mohon Saudara dapat menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi SDM/kepegawaian untuk mengikuti Bimbingan Teknis Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 pada:

hari, tanggal : Selasa, 9 Januari 2024

waktu : Pukul 09.00 - 11.00 WIB

tempat : *Zoom meeting (meeting ID: 997 5802 1594, passcode: ASN2024)*

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mohon peserta rapat memasuki ruang *meeting* tepat pada waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan 1 (satu) akun *Zoom* untuk masuk dalam ruang *meeting*, dan format nama akun *Zoom*: Instansi - Nama (contoh: Kementerian PANRB - Si Panday).

Demikian undangan kegiatan bimbingan teknis kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RINI WIDYANTINI
Sekretaris Kementerian
NIP. 196505291990032001

Tembusan
Menteri PANRB

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240108JNYR

Lampiran I

Surat Sekretaris Kementerian PANRB

Perihal: Undangan Bimbingan Teknis

Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

A. INSTANSI PUSAT

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian di lingkungan:

No.	Instansi	No.	Instansi
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	21	Kementerian Agama
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	22	Kementerian Ketenagakerjaan
3	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	23	Kementerian Sosial
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	25	Kementerian Kelautan dan Perikanan
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	26	Kementerian Komunikasi dan Informatika
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27	Kementerian Perdagangan
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	28	Kementerian Perindustrian
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	29	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11	Kementerian Dalam Negeri	31	Kementerian Sekretariat Negara
12	Kementerian Luar Negeri	32	Sekretariat Kabinet
13	Kementerian Pertahanan	33	Kejaksaan Agung
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	34	Badan Intelijen Negara
15	Kementerian Keuangan	35	Sekretariat Jenderal MPR
16	Kementerian Pertanian	36	Sekretariat Jenderal DPR RI
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	37	Mahkamah Agung
18	Kementerian Perhubungan	38	Badan Pemeriksa Keuangan
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	39	Setjen WANTANNAS
20	Kementerian Kesehatan	40	Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Instansi	No.	Instansi
41	Badan Kepegawaian Negara	61	Sekretariat Jenderal KOMNAS HAM
42	Lembaga Administrasi Negara	62	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
43	Badan Pusat Statistik	63	Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
44	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	64	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
45	Arsip Nasional Republik Indonesia	65	Sekretarian Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
46	Badan Informasi Geospasial	66	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
47	Badan Kependudukan dan KB Nasional	67	Badan Keamanan Laut RI
48	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	68	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
49	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	69	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
50	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	70	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
51	Perpustakaan Nasional	71	Ombudsman Republik Indonesia
52	Badan Standardisasi Nasional	72	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
53	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	73	Badan Pengawas Pemilihan Umum
54	Badan Pengawas Obat dan Makanan	74	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
55	Lembaga Ketahanan Nasional RI	75	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
56	Kepolisian Negara	76	Badan Riset dan Inovasi Nasional
57	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	77	Badan Pangan Nasional
58	Badan Narkotika Nasional	78	Otorita Ibu Kota Nusantara
59	Setjen Komisi Pemilihan Umum	79	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
60	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		

B. INSTANSI DAERAH

Sekretaris Daerah di lingkungan:

No.	Instansi	No.	Instansi
1	Pemerintah Aceh	41	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	42	Pemerintah Kab. Samosir
3	Pemerintah Kab. Pidie	43	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	44	Pemerintah Kab. Padang Lawas
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	45	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	46	Pemerintah Kab. Batubara
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	47	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	48	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	49	Pemerintah Kab. Nias Barat
10	Pemerintah Kab. Simeulue	50	Pemerintah Kab. Nias Utara
11	Pemerintah Kab. Bireuen	51	Pemerintah Kota Medan
12	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	52	Pemerintah Kota Tebing Tinggi
13	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	53	Pemerintah Kota Binjai
14	Pemerintah Kab. Gayo Lues	54	Pemerintah Kota Pematang Siantar
15	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	55	Pemerintah Kota Tanjung Balai
16	Pemerintah Kab. Nagan Raya	56	Pemerintah Kota Sibolga
17	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	57	Pemerintah Kota Padangsidimpuan
18	Pemerintah Kab. Bener Meriah	58	Pemerintah Kota Gunungsitoli
19	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	59	Pemerintah Provinsi Riau
20	Pemerintah Kota Sabang	60	Pemerintah Kab. Kampar
21	Pemerintah Kota Banda Aceh	61	Pemerintah Kab. Bengkalis
22	Pemerintah Kota Langsa	62	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
23	Pemerintah Kota Lhokseumawe	63	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
24	Pemerintah Kota Subulussalam	64	Pemerintah Kab. Pelalawan
25	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	65	Pemerintah Kab. Rokan Hulu
26	Pemerintah Kab. Deli Serdang	66	Pemerintah Kab. Rokan Hilir
27	Pemerintah Kab. Karo	67	Pemerintah Kab. Siak
28	Pemerintah Kab. Langkat	68	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
29	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	69	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
30	Pemerintah Kab. Simalungun	70	Pemerintah Kota Pekanbaru
31	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	71	Pemerintah Kota Dumai
32	Pemerintah Kab. Dairi	72	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
33	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	73	Pemerintah Kab. Agam
34	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	74	Pemerintah Kab. Pasaman
35	Pemerintah Kab. Asahan	75	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
36	Pemerintah Kab. Nias	76	Pemerintah Kab. Solok
37	Pemerintah Kab. Toba	77	Pemerintah Kab. Padang Pariaman
38	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	78	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
39	Pemerintah Kab. Nias Selatan	79	Pemerintah Kab. Tanah Datar
40	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	80	Pemerintah Kab. Sijunjung

No.	Instansi	No.	Instansi
81	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	121	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
82	Pemerintah Kab. Solok Selatan	122	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
83	Pemerintah Kab. Dharmasraya	123	Pemerintah Kab. Bangka
84	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	124	Pemerintah Kab. Belitung
85	Pemerintah Kota Bukittinggi	125	Pemerintah Kab. Bangka Barat
86	Pemerintah Kota Padang Panjang	126	Pemerintah Kab. Bangka Tengah
87	Pemerintah Kota Sawahlunto	127	Pemerintah Kab. Bangka Selatan
88	Pemerintah Kota Solok	128	Pemerintah Kab. Belitung Timur
89	Pemerintah Kota Padang	129	Pemerintah Kota Pangkal Pinang
90	Pemerintah Kota Payakumbuh	130	Pemerintah Provinsi Bengkulu
91	Pemerintah Kota Pariaman	131	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
92	Pemerintah Provinsi Jambi	132	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
93	Pemerintah Kab. Batang Hari	133	Pemerintah Kab. Rejang Lebong
94	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	134	Pemerintah Kab. Kaur
95	Pemerintah Kab. Bungo	135	Pemerintah Kab. Seluma
96	Pemerintah Kab. Merangin	136	Pemerintah Kab. Mukomuko
97	Pemerintah Kab. Kerinci	137	Pemerintah Kab. Kepahiang
98	Pemerintah Kab. Sarolangun	138	Pemerintah Kab. Lebong
99	Pemerintah Kab. Tebo	139	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
100	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	140	Pemerintah Kota Bengkulu
101	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	141	Pemerintah Provinsi Lampung
102	Pemerintah Kota Jambi	142	Pemerintah Kab. Lampung Selatan
103	Pemerintah Kota Sungai Penuh	143	Pemerintah Kab. Lampung Tengah
104	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	144	Pemerintah Kab. Lampung Utara
105	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	145	Pemerintah Kab. Lampung Barat
106	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	146	Pemerintah Kab. Tulang Bawang
107	Pemerintah Kab. Muara Enim	147	Pemerintah Kab. Tanggamus
108	Pemerintah Kab. Lahat	148	Pemerintah Kab. Way Kanan
109	Pemerintah Kab. Musi Rawas	149	Pemerintah Kab. Lampung Timur
110	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	150	Pemerintah Kab. Pesawaran
111	Pemerintah Kab. Banyuasin	151	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
112	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	152	Pemerintah Kab. Pringsewu
113	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	153	Pemerintah Kab. Mesuji
114	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	154	Pemerintah Kab. Pesisir Barat
115	Pemerintah Kab. Empat Lawang	155	Pemerintah Kota Metro
116	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	156	Pemerintah Kota Bandar Lampung
117	Pemerintah Kota Palembang	157	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
118	Pemerintah Kota Pagar Alam	158	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
119	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	159	Pemerintah Kab. Bogor
120	Pemerintah Kota Prabumulih	160	Pemerintah Kab. Sukabumi

No.	Instansi	No.	Instansi
161	Pemerintah Kab. Cianjur	201	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
162	Pemerintah Kab. Bekasi	202	Pemerintah Kab. Semarang
163	Pemerintah Kab. Karawang	203	Pemerintah Kab. Kendal
164	Pemerintah Kab. Purwakarta	204	Pemerintah Kab. Demak
165	Pemerintah Kab. Subang	205	Pemerintah Kab. Grobogan
166	Pemerintah Kab. Bandung	206	Pemerintah Kab. Pekalongan
167	Pemerintah Kab. Sumedang	207	Pemerintah Kab. Batang
168	Pemerintah Kab. Garut	208	Pemerintah Kab. Tegal
169	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	209	Pemerintah Kab. Brebes
170	Pemerintah Kab. Ciamis	210	Pemerintah Kab. Pati
171	Pemerintah Kab. Cirebon	211	Pemerintah Kab. Kudus
172	Pemerintah Kab. Kuningan	212	Pemerintah Kab. Pemalang
173	Pemerintah Kab. Indramayu	213	Pemerintah Kab. Jepara
174	Pemerintah Kab. Majalengka	214	Pemerintah Kab. Rembang
175	Pemerintah Kab. Bandung Barat	215	Pemerintah Kab. Blora
176	Pemerintah Kab. Pangandaran	216	Pemerintah Kab. Banyumas
177	Pemerintah Kota Bandung	217	Pemerintah Kab. Cilacap
178	Pemerintah Kota Bogor	218	Pemerintah Kab. Purbalingga
179	Pemerintah Kota Sukabumi	219	Pemerintah Kab. Banjarnegara
180	Pemerintah Kota Cirebon	220	Pemerintah Kab. Magelang
181	Pemerintah Kota Bekasi	221	Pemerintah Kab. Temanggung
182	Pemerintah Kota Depok	222	Pemerintah Kab. Wonosobo
183	Pemerintah Kota Cimahi	223	Pemerintah Kab. Purworejo
184	Pemerintah Kota Tasikmalaya	224	Pemerintah Kab. Kebumen
185	Pemerintah Kota Banjar	225	Pemerintah Kab. Klaten
186	Pemerintah Provinsi Banten	226	Pemerintah Kab. Boyolali
187	Pemerintah Kab. Serang	227	Pemerintah Kab. Sragen
188	Pemerintah Kab. Pandeglang	228	Pemerintah Kab. Sukoharjo
189	Pemerintah Kab. Lebak	229	Pemerintah Kab. Karanganyar
190	Pemerintah Kab. Tangerang	230	Pemerintah Kab. Wonogiri
191	Pemerintah Kota Tangerang	231	Pemerintah Kota Semarang
192	Pemerintah Kota Cilegon	232	Pemerintah Kota Salatiga
193	Pemerintah Kota Serang	233	Pemerintah Kota Pekalongan
194	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	234	Pemerintah Kota Tegal
195	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	235	Pemerintah Kota Magelang
196	Pemerintah Kab. Bantul	236	Pemerintah Kota Surakarta
197	Pemerintah Kab. Sleman	237	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
198	Pemerintah Kab. Gunung Kidul	238	Pemerintah Kab. Gresik
199	Pemerintah Kab. Kulon Progo	239	Pemerintah Kab. Mojokerto
200	Pemerintah Kota Yogyakarta	240	Pemerintah Kab. Sidoarjo

No.	Instansi	No.	Instansi
241	Pemerintah Kab. Jombang	281	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
242	Pemerintah Kab. Sampang	282	Pemerintah Kab. Ketapang
243	Pemerintah Kab. Pamekasan	283	Pemerintah Kab. Bengkayang
244	Pemerintah Kab. Sumenep	284	Pemerintah Kab. Landak
245	Pemerintah Kab. Bangkalan	285	Pemerintah Kab. Melawi
246	Pemerintah Kab. Bondowoso	286	Pemerintah Kab. Sekadau
247	Pemerintah Kab. Situbondo	287	Pemerintah Kab. Kubu Raya
248	Pemerintah Kab. Banyuwangi	288	Pemerintah Kab. Kayong Utara
249	Pemerintah Kab. Jember	289	Pemerintah Kota Pontianak
250	Pemerintah Kab. Malang	290	Pemerintah Kota Singkawang
251	Pemerintah Kab. Pasuruan	291	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
252	Pemerintah Kab. Probolinggo	292	Pemerintah Kab. Kapuas
253	Pemerintah Kab. Lumajang	293	Pemerintah Kab. Barito Utara
254	Pemerintah Kab. Kediri	294	Pemerintah Kab. Barito Selatan
255	Pemerintah Kab. Tulungagung	295	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
256	Pemerintah Kab. Nganjuk	296	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
257	Pemerintah Kab. Trenggalek	297	Pemerintah Kab. Pulang Pisau
258	Pemerintah Kab. Blitar	298	Pemerintah Kab. Gunung Mas
259	Pemerintah Kab. Madiun	299	Pemerintah Kab. Lamandau
260	Pemerintah Kab. Ngawi	300	Pemerintah Kab. Sukamara
261	Pemerintah Kab. Magetan	301	Pemerintah Kab. Murung Raya
262	Pemerintah Kab. Ponorogo	302	Pemerintah Kab. Katingan
263	Pemerintah Kab. Pacitan	303	Pemerintah Kab. Seruyan
264	Pemerintah Kab. Bojonegoro	304	Pemerintah Kab. Barito Timur
265	Pemerintah Kab. Tuban	305	Pemerintah Kota Palangka Raya
266	Pemerintah Kab. Lamongan	306	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
267	Pemerintah Kota Surabaya	307	Pemerintah Kab. Banjar
268	Pemerintah Kota Mojokerto	308	Pemerintah Kab. Tanah Laut
269	Pemerintah Kota Malang	309	Pemerintah Kab. Tapin
270	Pemerintah Kota Pasuruan	310	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
271	Pemerintah Kota Probolinggo	311	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
272	Pemerintah Kota Blitar	312	Pemerintah Kab. Barito Kuala
273	Pemerintah Kota Kediri	313	Pemerintah Kab. Tabalong
274	Pemerintah Kota Madiun	314	Pemerintah Kab. Kotabaru
275	Pemerintah Kota Batu	315	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
276	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	316	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
277	Pemerintah Kab. Sambas	317	Pemerintah Kab. Balangan
278	Pemerintah Kab. Sanggau	318	Pemerintah Kota Banjarmasin
279	Pemerintah Kab. Sintang	319	Pemerintah Kota Banjarbaru
280	Pemerintah Kab. Mempawah	320	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Instansi	No.	Instansi
321	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	361	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
322	Pemerintah Kab. Paser	362	Pemerintah Kab. Parigi Moutong
323	Pemerintah Kab. Berau	363	Pemerintah Kab. Tojo Una Una
324	Pemerintah Kab. Kutai Barat	364	Pemerintah Kab. Sigi
325	Pemerintah Kab. Kutai Timur	365	Pemerintah Kab. Banggai Laut
326	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	366	Pemerintah Kab. Morowali Utara
327	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	367	Pemerintah Kota Palu
328	Pemerintah Kota Samarinda	368	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
329	Pemerintah Kota Balikpapan	369	Pemerintah Kab. Pinrang
330	Pemerintah Kota Bontang	370	Pemerintah Kab. Gowa
331	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	371	Pemerintah Kab. Wajo
332	Pemerintah Kab. Minahasa	372	Pemerintah Kab. Bone
333	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	373	Pemerintah Kab. Tana Toraja
334	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	374	Pemerintah Kab. Maros
335	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	375	Pemerintah Kab. Luwu
336	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	376	Pemerintah Kab. Sinjai
337	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	377	Pemerintah Kab. Bulukumba
338	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	378	Pemerintah Kab. Bantaeng
339	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	379	Pemerintah Kab. Jeneponto
340	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	380	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
341	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	381	Pemerintah Kab. Takalar
342	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	382	Pemerintah Kab. Barru
343	Pemerintah Kota Manado	383	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
344	Pemerintah Kota Bitung	384	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
345	Pemerintah Kota Tomohon	385	Pemerintah Kab. Soppeng
346	Pemerintah Kota KotaMobagu	386	Pemerintah Kab. Enrekang
347	Pemerintah Provinsi Gorontalo	387	Pemerintah Kab. Luwu Utara
348	Pemerintah Kab. Gorontalo	388	Pemerintah Kab. Luwu Timur
349	Pemerintah Kab. Boalemo	389	Pemerintah Kab. Toraja Utara
350	Pemerintah Kab. Pohuwato	390	Pemerintah Kota Makassar
351	Pemerintah Kab. Bone Bolango	391	Pemerintah Kota Parepare
352	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	392	Pemerintah Kota Palopo
353	Pemerintah Kota Gorontalo	393	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
354	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	394	Pemerintah Kab. Konawe
355	Pemerintah Kab. Poso	395	Pemerintah Kab. Buton
356	Pemerintah Kab. Donggala	396	Pemerintah Kab. Muna
357	Pemerintah Kab. Tolitoli	397	Pemerintah Kab. Kolaka
358	Pemerintah Kab. Banggai	398	Pemerintah Kab. Konawe Selatan
359	Pemerintah Kab. Buol	399	Pemerintah Kab. Kolaka Utara
360	Pemerintah Kab. Morowali	400	Pemerintah Kab. Bombana

No.	Instansi	No.	Instansi
401	Pemerintah Kab. Wakatobi	441	Pemerintah Kab. Ngada
402	Pemerintah Kab. Buton Utara	442	Pemerintah Kab. Manggarai
403	Pemerintah Kab. Konawe Utara	443	Pemerintah Kab. Sumba Timur
404	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	444	Pemerintah Kab. Sumba Barat
405	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	445	Pemerintah Kab. Lembata
406	Pemerintah Kab. Buton Selatan	446	Pemerintah Kab. Rote Ndao
407	Pemerintah Kab. Buton Tengah	447	Pemerintah Kab. Manggarai Barat
408	Pemerintah Kab. Muna Barat	448	Pemerintah Kab. Manggarai Timur
409	Pemerintah Kota Kendari	449	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
410	Pemerintah Kota Baubau	450	Pemerintah Kab. Nagekeo
411	Pemerintah Provinsi Bali	451	Pemerintah Kab. Sumba Tengah
412	Pemerintah Kab. Buleleng	452	Pemerintah Kab. Sabu Raijua
413	Pemerintah Kab. Jembrana	453	Pemerintah Kab. Malaka
414	Pemerintah Kab. Klungkung	454	Pemerintah Kota Kupang
415	Pemerintah Kab. Gianyar	455	Pemerintah Provinsi Maluku
416	Pemerintah Kab. Karangasem	456	Pemerintah Kab. Maluku Tengah
417	Pemerintah Kab. Bangli	457	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
418	Pemerintah Kab. Badung	458	Pemerintah Kab. Buru
419	Pemerintah Kab. Tabanan	459	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar
420	Pemerintah Kota Denpasar	460	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
421	Pemerintah Provinsi NTB	461	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
422	Pemerintah Kab. Lombok Barat	462	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
423	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	463	Pemerintah Kab. Buru Selatan
424	Pemerintah Kab. Lombok Timur	464	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
425	Pemerintah Kab. Bima	465	Pemerintah Kota Ambon
426	Pemerintah Kab. Sumbawa	466	Pemerintah Kota Tual
427	Pemerintah Kab. Dompu	467	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
428	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	468	Pemerintah Kab. Halmahera Barat
429	Pemerintah Kab. Lombok Utara	469	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
430	Pemerintah Kota Mataram	470	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
431	Pemerintah Kota Bima	471	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
432	Pemerintah Provinsi NTT	472	Pemerintah Kab. Halmahera Utara
433	Pemerintah Kab. Kupang	473	Pemerintah Kab. Halmahera Timur
434	Pemerintah Kab. Belu	474	Pemerintah Kab. Pulau Morotai
435	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	475	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
436	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	476	Pemerintah Kota Ternate
437	Pemerintah Kab. Alor	477	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
438	Pemerintah Kab. Sikka	478	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
439	Pemerintah Kab. Flores Timur	479	Pemerintah Kab. Bintan
440	Pemerintah Kab. Ende	480	Pemerintah Kab. Karimun

No.	Instansi	No.	Instansi
481	Pemerintah Kab. Natuna	521	Pemerintah Kab. Keerom
482	Pemerintah Kab. Lingga	522	Pemerintah Kab. Waropen
483	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	523	Pemerintah Kab. Supiori
484	Pemerintah Kota Batam	524	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
485	Pemerintah Kota Tanjungpinang	525	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
486	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	526	Pemerintah Kab. Lanny Jaya
487	Pemerintah Kab. Pasangkayu	527	Pemerintah Kab. Yalimo
488	Pemerintah Kab. Mamuju	528	Pemerintah Kab. Nduga
489	Pemerintah Kab. Mamasa	529	Pemerintah Kab. Dogiyai
490	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	530	Pemerintah Kab. Puncak
491	Pemerintah Kab. Majene	531	Pemerintah Kab. Deiyai
492	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	532	Pemerintah Kab. Intan Jaya
493	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	533	Pemerintah Kota Jayapura
494	Pemerintah Kab. Bulungan	534	Pemerintah Kab. Sorong
495	Pemerintah Kab. Malinau	535	Pemerintah Kab. Sorong Selatan
496	Pemerintah Kab. Nunukan	536	Pemerintah Kab. Raja Ampat
497	Pemerintah Kab. Tana Tidung	537	Pemerintah Kab. Manokwari
498	Pemerintah Kota Tarakan	538	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
499	Pemerintah Provinsi Papua	539	Pemerintah Kab. Teluk Wondama
500	Pemerintah Provinsi Papua Barat	540	Pemerintah Kab. Fak-Fak
501	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	541	Pemerintah Kab. Kaimana
502	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	542	Pemerintah Kab. Tambrauw
503	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	543	Pemerintah Kab. Maybrat
504	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	544	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
505	Pemerintah Kab. Jayapura	545	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
506	Pemerintah Kab. Biak Numfor	546	Pemerintah Kota Sorong
507	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen		
508	Pemerintah Kab. Merauke		
509	Pemerintah Kab. Jayawijaya		
510	Pemerintah Kab. Nabire		
511	Pemerintah Kab. Puncak Jaya		
512	Pemerintah Kab. Paniai		
513	Pemerintah Kab. Mimika		
514	Pemerintah Kab. Boven Digoel		
515	Pemerintah Kab. Mappi		
516	Pemerintah Kab. Asmat		
517	Pemerintah Kab. Yahukimo		
518	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang		
519	Pemerintah Kab. Tolikara		
520	Pemerintah Kab. Sarmi		

Lampiran II
 Surat Sekretaris Kementerian PANRB
 Perihal: Undangan Bimbingan Teknis Persiapan
 Pengadaan ASN Tahun 2024

**SUSUNAN ACARA BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN
 PENGADAAN ASN TAHUN 2024**

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.15	Paparan Narasumber:	Kebijakan Pengadaan ASN T.A. 2024 Plt. Deputi bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian PANRB
09.15 – 09.30		Implementasi Pengadaan ASN T.A. 2024 Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
09.30 – 09.45		Penyelesaian Pengangkatan Guru Non ASN Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek
09.45 – 10.00		Penyelesaian Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Non ASN Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
10.00 – 10.15		Kebijakan Penganggaran Pengadaan ASN T.A. 2024 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kementerian Keuangan
10.15 – 10.45		Bimbingan Teknis Pengadaan ASN T.A. 2024 Tim Teknis Kementerian PANRB
10.45 – 11.00	Diskusi	Moderator
11.00	Penutupan	Panitia